



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RENCANA KERJA 2024



Visit Our Website
kesbangpol.kaltimprov.go.id





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;

- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Landasan Hukum.....4

1.3. Maksud dan Tujuan7

1.4. Sistematika Penulisan8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN 9

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan.....9

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD41

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD42

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....53

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku
Kepentingan62

BAB III TUJUAN DAN SASARAN67

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional67

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD67

3.3. Program dan Kegiatan68

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....75

BAB V PENUTUP88

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 273 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Dalam perencanaan pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, konflik dan tantangan, melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk siap dan sanggup membuat atau menyusun suatu perencanaan yang baik. Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra 2024-2026 Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

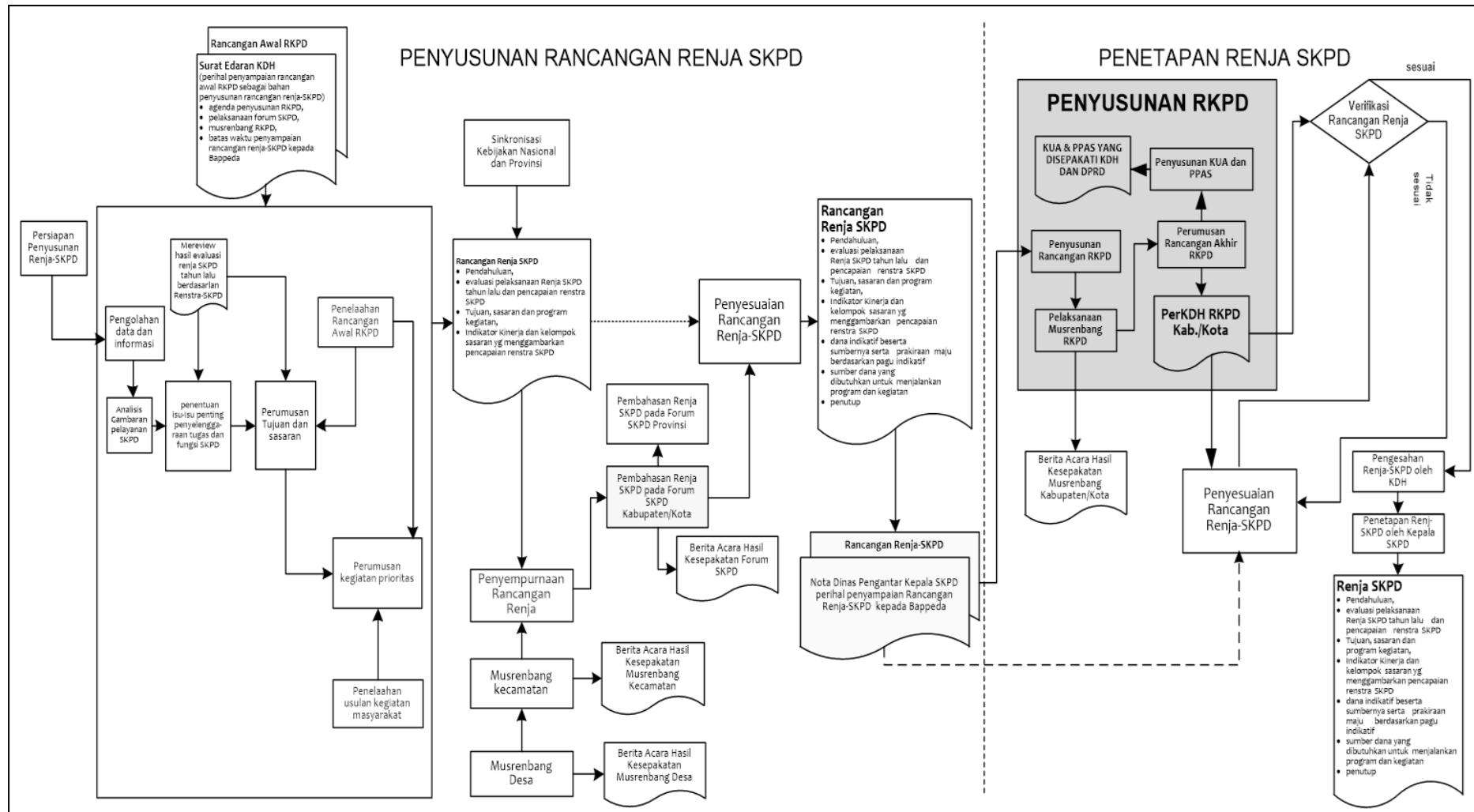
Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, RENJA-SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tenaga Kerja Asing di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
48. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
49. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ini adalah sebagai pedoman dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi penyesuaian sub kegiatan, indikator dan pagu anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi acuan bagi Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur untuk penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan, target indikator dan pagu anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Tahun 2024;
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (Triwulan II)

Pada Tahun 2023 ada 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang menjadi garapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan visi **"Berani Untuk Kaltim yang Berdaulat"**.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya bersifat non fisik, yaitu berupa sosialisasi dan penyuluhan baik itu yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Timur.

Adapun evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (KINERJA)
Tahun Anggaran 2023 Triwulan II
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB	
				TARGET	SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Pelayanan Publik pada Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Publik pada Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99,00	%	91,50	92,42%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7,00	Dokumen	3,00	42,86%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,00	Laporan	4,00	44,44%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40,00	Orang	40,00	100,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00	Dokumen	0,00	0,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3,00	Laporan	0,00	0,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT	
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00	Laporan	2,00	50,00%	SEKRETARIAT	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60,00	Paket	55,00	91,67%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17,00	Paket	10,00	58,82%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6,00	Paket	6,00	100,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,00	Laporan	5,00	71,43%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,00	Dokumen	0,00	0,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpenuhi	2,00	Unit	8,00	400,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18,00	Unit	12,00	66,67%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,00	Bulan	6,00	50,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5,00	Unit	2,50	50,00%	SEKRETARIAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB	
				TARGET	SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28,00	Unit	14,00	50,00%	SEKRETARIAT	
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pelajar yang mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8,00	%	7,04	88,01%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelajar SLTA yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12187,00	Orang	10.726,00	88,01%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER	
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	14547,00	Orang	11.571,00	79,54%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER	
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	27,00	Orang	10,00	37,04%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER	
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER	
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	Meningkatnya penggunaan hak- hak politik masyarakat	Persentase penggunaan hak-hak poliitk masyarakat	75,50	%	20,00	26,49%	BID. POLDAGRI	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB	
				TARGET	SATUAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan	Tingkat Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan	56,85	%	40,00	70,36%	BID. POLDAGRI	
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1315,00	Orang	438,00	33,31%	BID. POLDAGRI	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33,00	Orang	10,00	30,30%	BID. POLDAGRI	
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Terlaksananya Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. POLDAGRI	

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
08.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim	40,05	%	23,70	59,18%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang terbina	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina	147,00	Ormas	87,00	59,18%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	620,00	Orang	115,00	18,55%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	27,00	Orang	15,00	55,56%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Tersusunnya rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100,00	%	50,00	50,00%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	4,00	Rekomendasi	2,00	50,00%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	560,00	Orang	107,00	19,11%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30,00	Orang	13,00	43,33%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur	33,00	%	9,57	29,00%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penurunan Jumlah Konflik Ipoleksosbud	Jumlah Konflik Ipoleksosbud	100,00	Konflik	32,00	32,00%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama	969,00	Orang	295,00	30,44%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI PER TW 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
				TARGET	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah					KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	33,00	Orang	10,00	30,30%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	4,00	Laporan	2,00	50,00%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00	Dokumen	1,00	100,00%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (KEUANGAN)
Tahun Anggaran 2023 Triwulan II
Provinsi Kalimantan Timur

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
08	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	111.878.505.813	94.054.273.086	84,07%	BADAN KESBANGPOL PROV. KALTIM
08.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	20.278.873.813	10.875.907.874	53,63%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	985.224.000	540.793.270	54,89%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	690.559.000	495.267.270	71,72%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.665.000	45.526.000	15,45%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.088.553.463	4.099.598.188	40,64%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.574.575.963	3.880.377.388	40,53%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	388.200.000	176.040.000	45,35%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	125.777.500	43.180.800	34,33%	SEKRETARIAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Triwulanan/Semesteran SKPD				
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.090.000	-	0,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	36.090.000	-	0,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.440.000	39.600.000	89,11%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.440.000	39.600.000	89,11%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.030.256.150	1.076.673.193	35,53%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	822.694.650	31.088.400	3,78%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.640.000	8.721.650	14,62%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.733.621.500	1.036.863.143	59,81%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	414.300.000	-	0,00%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.955.296.000	4.613.200.000	93,10%	SEKRETARIAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.955.296.000	4.613.200.000	93,10%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	969.987.200	465.045.697	47,94%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.606.000	44.829.514	24,42%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	786.381.200	420.216.183	53,44%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.027.000	40.997.526	24,26%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.947.000	36.747.526	24,18%	SEKRETARIAT
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.080.000	4.250.000	24,88%	SEKRETARIAT
08.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.879.494.500	938.381.870	49,93%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	1.879.494.500	938.381.870	49,93%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.388.694.500	683.725.150	49,24%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	243.000.000	91.214.920	37,54%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	247.800.000	163.441.800	65,96%	BID. BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
08.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	12.377.372.500	10.006.037.458	80,84%	BID. POLDAGRI

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12.377.372.500	10.006.037.458	80,84%	BID. POLDAGRI
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.707.172.500	9.745.570.393	83,24%	BID. POLDAGRI
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	288.000.000	65.284.847	22,67%	BID. POLDAGRI

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	382.200.000	195.182.218	51,07%	BID. POLDAGRI
08.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	72.202.966.500	71.009.463.534	98,35%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	72.202.966.500	71.009.463.534	98,35%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	71.748.766.500	70.825.925.500	98,71%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	214.800.000	98.206.034	45,72%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	239.400.000	85.332.000	35,64%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
08.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	906.220.000	170.749.430	18,84%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	906.220.000	170.749.430	18,84%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	489.820.000	22.373.000	4,57%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	231.600.000	94.637.630	40,86%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	184.800.000	53.738.800	29,08%	BID. KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORMAS
08.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	4.233.578.500	1.053.732.920	24,89%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.233.578.500	1.053.732.920	24,89%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.160.568.500	256.626.400	22,11%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	288.000.000	90.532.020	31,43%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI PER TRIWULAN 2	CAPAIAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	340.200.000	132.824.500	39,04%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.444.810.000	573.750.000	23,47%	BID. PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara garis besar capaian kinerja pelayanan SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

Indikator	SP M	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	1,99%	3,97%	7,00%	8,00%	
Persentase Hak-Hak Politik Masyarakat			67,00%	67,50%	68,00%	68,50%	66,27%	64,56 %	68,00%	68,50%	
Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim			120Ormas	27,25%	32,70%	40,05%	178 Ormas	22,07 %	27,25%	32,70%	
Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	75,00 %	100,00 %	100,00 %	
Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur			102 Konflik	33,66%	33,33%	33,00%	70Konflik	21,45 %	33,33%	33,00%	

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yakni Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, hal ini perlu dilakukan dan menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mendorong agar partisipasi lebih meningkat.
4. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, bagi semua elemen masyarakat terutama pelajar yang ada di Kalimantan Timur.
5. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat, dengan demikian kondusifitas daerah dapat terus dimantapkan.
6. Peningkatan, pembinaan dan penanganan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Ranwal RKPD dan hasil Analisa kebutuhan pelaksanaan tahun 2024, dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Prov. Kaltim			413.170.594.417,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Prov. Kaltim			413.170.594.417,00
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,63 Indeks	18.628.506.000,00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,63 Indeks	18.628.506.000,00
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100,00 %					Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100,00 %	
01.1-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100,00 %	984.145.000,00	01.1-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100,00 %	984.145.000,00
01.1-01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00 Dokumen	452.845.000,00	01.1-01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00 Dokumen	452.845.000,00
01.1-01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00 Dokumen	14.940.000,00	01.1-01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00 Dokumen	14.940.000,00
01.1-01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00 Dokumen	3.590.000,00	01.1-01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00 Dokumen	3.590.000,00
01.1-01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan	3.590.000,00	01.1-01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan	3.590.000,00
01.1-01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan	509.180.000,00	01.1-01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan	509.180.000,00
01.1-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	96,50 %	9.867.770.000,00	01.1-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	96,50 %	9.867.770.000,00
01.1-02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45,00 Orang/Bulan	9.000.000.000,00	01.1-02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45,00 Orang/Bulan	9.000.000.000,00
01.1-02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	587.400.000,00	01.1-02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	587.400.000,00
01.1-02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 Dokumen	9.330.000,00	01.1-02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 Dokumen	9.330.000,00
01.1-02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 Dokumen	1.795.000,00	01.1-02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 Dokumen	1.795.000,00
01.1-02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00 Laporan	267.450.000,00	01.1-02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00 Laporan	267.450.000,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1-02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1.795.000,00	01.1-02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1.795.000,00
01.1-03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30,00 %	44.975.000,00	01.1-03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30,00 %	44.975.000,00
01.1-03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00 Dokumen	3.590.000,00	01.1-03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00 Dokumen	3.590.000,00
01.1-03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen	1.795.000,00	01.1-03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen	1.795.000,00
01.1-03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	37.795.000,00	01.1-03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	37.795.000,00
01.1-03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	1.795.000,00	01.1-03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	1.795.000,00
01.1-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	25,00 %	548.209.000,00	01.1-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	25,00 %	548.209.000,00
01.1-05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5,00 Paket	222.794.000,00	01.1-05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5,00 Paket	222.794.000,00
01.1-05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60,00 Dokumen	7.707.500,00	01.1-05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60,00 Dokumen	7.707.500,00
01.1-05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60,00 Dokumen	7.707.500,00	01.1-05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60,00 Dokumen	7.707.500,00
01.1-05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24,00 Orang	310.000.000,00	01.1-05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24,00 Orang	310.000.000,00
01.1-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95,00 %	4.847.459.800,00	01.1-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95,00 %	4.847.459.800,00
01.1-06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	75.000.000,00	01.1-06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	75.000.000,00
01.1-06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15,00 Paket	1.606.277.200,00	01.1-06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15,00 Paket	1.606.277.200,00
01.1-06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	80.915.000,00	01.1-06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	80.915.000,00
01.1-06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00 Laporan	2.615.892.600,00	01.1-06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00 Laporan	2.615.892.600,00
01.1-06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,00 Dokumen	469.375.000,00	01.1-06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,00 Dokumen	469.375.000,00
01.1-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	1.320.563.200,00	01.1-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	1.320.563.200,00

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.1-08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	30.000.000,00	01.1-08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	30.000.000,00
01.1-08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	228.392.000,00	01.1-08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	228.392.000,00
01.1-08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13,00 Laporan	1.062.171.200,00	01.1-08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13,00 Laporan	1.062.171.200,00
01.1-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100,00 %	1.015.384.000,00	01.1-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100,00 %	1.015.384.000,00
01.1-09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00 Unit	84.960.000,00	01.1-09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00 Unit	84.960.000,00
01.1-09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00 Unit	107.750.000,00	01.1-09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00 Unit	107.750.000,00
01.1-09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61,00 Unit	42.674.000,00	01.1-09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61,00 Unit	42.674.000,00
01.1-09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10,00 Unit	200.000.000,00	01.1-09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10,00 Unit	200.000.000,00
01.1-09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	580.000.000,00	01.1-09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	580.000.000,00
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prov. Kaltim	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100,00 %	18.700.000.000,00	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prov. Kaltim	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100,00 %	18.700.000.000,00
02.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6,00 Dokumen	18.700.000.000,00	02.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6,00 Dokumen	18.700.000.000,00
02.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10910,00 Orang	16.823.262.500,00	02.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10910,00 Orang	16.823.262.500,00
02.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00 Laporan	1.726.200.000,00	02.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00 Laporan	1.726.200.000,00
02.1-01.006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan	1,00 Dokumen	150.537.500,00	02.1-01.006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan	1,00 Dokumen	150.537.500,00

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat				Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat		
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prov. Kaltim	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,30 %	363.467.088.417,00	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prov. Kaltim	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,30 %	363.467.088.417,00
03.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4,00 Dokumen	363.467.088.417,00	03.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4,00 Dokumen	363.467.088.417,00
03.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2148,00 Orang	362.811.888.417,00	03.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2148,00 Orang	362.811.888.417,00
03.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00 Laporan	655.200.000,00	03.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00 Laporan	655.200.000,00
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prov. Kaltim	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31,21 %	3.625.648.000,00	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prov. Kaltim	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31,21 %	3.625.648.000,00
04.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3,00 Dokumen	3.625.648.000,00	04.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3,00 Dokumen	3.625.648.000,00
04.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas.	1295,00 Orang	3.386.248.000,00	04.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas.	1295,00 Orang	3.386.248.000,00

RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
04.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00 Laporan	239.400.000,00	04.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00 Laporan	239.400.000,00
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prov. Kaltim	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100,00 %	2.049.352.000,00	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prov. Kaltim	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100,00 %	2.049.352.000,00
05.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4,00 Dokumen	2.049.352.000,00	05.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4,00 Dokumen	2.049.352.000,00
05.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1070,00 Orang	1.847.752.000,00	05.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1070,00 Orang	1.847.752.000,00
05.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00 Laporan	201.600.000,00	05.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00 Laporan	201.600.000,00
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prov. Kaltim	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100,00 %	6.700.000.000,00	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prov. Kaltim	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100,00 %	6.700.000.000,00
06.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8,00 Dokumen	6.700.000.000,00	06.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8,00 Dokumen	6.700.000.000,00
06.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	2015,00 Orang	3.112.000.000,00	06.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	2015,00 Orang	3.112.000.000,00
06.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama	4,00 Laporan	588.000.000,00	06.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama	4,00 Laporan	588.000.000,00

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah				Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah		
06.1-01.006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00 Dokumen	3.000.000.000,00	06.1-01.006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00 Dokumen	3.000.000.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan

Penelaahan usulan program dan kegiatan pemangku kepentingan dapat dijelaskan dari tabel berikut

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan
Provinsi Kalimantan Timur

NO	NAMA PEMOHON	MAKSUD USULAN	JUMLAH USULAN SETELAH VERIFIKASI
1	Komando Resor Militer 091/ASN Batalyon Infanteri 611/Awang Long	Bantuan Hibah Rehab Barak dan Dapur Kompi Senapan A Yonif 611/Awang Long	Rp 936.724.953,82
2	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer VI/Mulawarman	Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat Makodam VI/MLW TA 2023	Rp 3.000.000.000,00
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur	Permohonan Dukungan Anggaran Pengamanan Pilkada Serentak Kaltim Tahun 2024	Rp 52.309.309.000,00
4	Pangkalan Utama TNI AL XIII Pangkalan TNI AL Balikpapan	Mohon Bantuan Pengadaan Admiral Boat untuk mendukung Transportasi Jalur Laut VIP dari Balikpapan ke IKN	Rp 5.059.850.000,00
5	Komando Daerah Militer VI/Mulawarman Komando Resor Militer 091/ASN	Renovasi Berat Perumahan Asrama Type K-Tahap 2 (6 Barak 48 KK)	Rp 16.489.052.000,00

NO	NAMA PEMOHON	MAKSUD USULAN	JUMLAH USULAN SETELAH VERIFIKASI
6	Komando Daerah Militer VI/Mulawarman Komando Resor Militer 091/ASN	Pengamanan Pilkada Serentak Provinsi Kaltim TA.2024	Rp 4.664.359.500,00
7	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer VI/Mulawarman	Permohonan belanja Hibah untuk Pengamanan Pilkada Provinsi Kaltim Tahun 2024	Rp 4.892.430.000,00
8	Detasemen Kesehatan Wilayah 06.04.01 Rumah Sakit Tingkat IV Samarinda (Korem)	Pengajuan Ambulance VVIP Rumah Sakit TK. IV Samarinda Tahun 2024	Rp 1.587.300.000,00
9	Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Timur Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia	Pelaksanaan Kegiatan UII	Rp 200.000.000,00
10	Komando Resimen Mahasiswa Mulawarman Kaltim	Permohonan Bantuan Dana ABT APBD untuk mendukung Pelaksanaan Kerja Resimen Mahasiswa	Rp 200.000.000,00
11	Dewan Pimpinan Provinsi Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Kalimantan Timur	Untuk Menunjang Kegiatan Operasional DPP IARMI Kaltim	Rp 200.000.000,00
12	Ikatan Masyarakat Samarinda Asal Karya Baru Bugi (IMASKAB)	Permohonan Kegiatan Ikatan Masyarakat Samarinda Asal Karya Baru Bugi Tahun 2023	Rp 75.000.000,00

NO	NAMA PEMOHON	MAKSUD USULAN	JUMLAH USULAN SETELAH VERIFIKASI
13	Mitra Iswara Lembaga Pengembangan SDM dan Kajian Daerah	1. Program Survey Partisipasi Politik dan Pelembagaan Demokrasi di Kalimantan Timur. 2. Kajian Revitalisasi Peran BUMD terhadap Pendapatan Daerah di Kalimantan Timur.	Rp 200.000.000,00
14	Yayasan Sekata Cabang Kutai Kartanegara	Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Pencegahan Penyalahgunaan Napza (P4GN)	Rp 200.000.000,00
15	Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	Kegiatan Operasional dan Program PMI Provinsi Kalimantan Timur	Rp 200.000.000,00
16	Koperasi Produsen Kukar Idaman Lestari	Pengadaan Balai Pertemuan Agrowisata Edukasi Budidaya Lebah Kelulut	Rp 200.000.000,00
17	Lembaga Pengembangan Kreativitas Remaja Kaltim	Pelatihan Jurnalistik se Kaltim	Rp 100.000.000,00
18	DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kaltim	Mendukung Kegiatan Organisasi dan berbagai aktifitas yang merupakan Program Kerja Organisasi	Rp 200.000.000,00
19	Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Prov. Kaltim	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kahmi	Rp 200.000.000,00
20	Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Berau	Permohonan Bantuan Seragam	Rp 100.000.000,00
21	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kaltim	Permohonan Bantuan Program dan Kegiatan IMM	Rp 100.000.000,00

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan dan dapat mencapai target yang dicapai, maka pada masa pemerintahan tahun 2020-2024 mempunyai Visi, Misi dan beberapa agenda prioritas yang tercantum sebagai berikut:

VISI: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai Rencana Strategis 2024-2026 telah ditetapkan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi: yang dimaksud adalah penerapan core value ASN yang profesional serta mendukung pelayanan publik yang berjalan dengan standar kualitas yang baik dan inovatif sehingga mampu memberikan kepuasan layanan bagi seluruh kelompok sasaran, khususnya bagi masyarakat.

Tabel 3.2.1.
Tujuan RPD 2024-2026 yang menjadi acuan

TUJUAN	
Uraian	Indikator
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi

Adapun sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK.

Tabel 3.2.2.
Sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi acuan

Sasaran	
Uraian	Indikator
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Sistem Merit
	Indeks Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (SPBE)
	Nilai Akutabilitas Kinerja
	Tingkat Maturitas SPIP

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD 2024-2026 yang menjadi acuan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat terlihat pada Tabel 3.2.3. berikut:

Tabel 3.2.3.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				Satuan	2024
Tujuan 1: Terwujudnya masyarakat Kalimantan Timur yang demokratis		Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	81,02	Indeks	81,10
	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	77,90	Indeks	77,95
	Sasaran 2: Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah potensi konflik Ipoleksosbud	31	Potensi Konflik	100
Tujuan 2: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas		1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	84,41	Indeks	85,00
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	78,10	Poin	78,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				Satuan	2024	2025	2026
	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	74,26	Indeks	75,00	75,50	76,00
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	66,97	Nilai	68,00	68,50	69,00

3.3 Program dan Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022 terdapat 6 Program, 12 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp 413.170.594.417,00.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 6) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 - 2) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan
 - 3) Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 2) Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- 2) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 3) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN 2025	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Prov. Kaltim			413.170.594.417,00		32.000.000.000,00
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prov. Kaltim	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,63 Indeks	11.445.099.000,00	78,68	10.915.125.000,00
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100,00 %	7.183.407.000,00	100,00	6.084.875.000,00
01.1-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100,00 %	984.145.000,00	100,00	880.725.000,00
01.1-01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00 Dokumen	452.845.000,00	4,00	347.845.000,00
01.1-01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,00 Dokumen	14.940.000,00	2,00	14.940.000,00
01.1-01.004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,00 Dokumen	3.590.000,00	2,00	3.590.000,00
01.1-01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00 Laporan	3.590.000,00	2,00	23.290.000,00
01.1-01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00 Laporan	509.180.000,00	4,00	491.060.000,00
01.1-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase realisasi anggaran	96,50 %	9.867.770.000,00	96,75	9.780.770.000,00

RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN 2025	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
01.1-02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45,00 Orang/Bulan	9.000.000.000,00	45,00	9.000.000.000,00
01.1-02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	587.400.000,00	12,00	587.400.000,00
01.1-02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00 Dokumen	9.330.000,00	12,00	9.330.000,00
01.1-02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1,00 Dokumen	1.795.000,00	1,00	1.795.000,00
01.1-02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00 Laporan	267.450.000,00	12,00	180.450.000,00
01.1-02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00 Dokumen	1.795.000,00	1,00	1.795.000,00
01.1-03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30,00 %	44.975.000,00	35,00	62.975.000,00
01.1-03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00 Dokumen	3.590.000,00	2,00	3.590.000,00
01.1-03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen	1.795.000,00	1,00	1.795.000,00
01.1-03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	37.795.000,00	2,00	55.795.000,00
01.1-03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,00 Laporan	1.795.000,00	2,00	1.795.000,00

RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN 2025	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
01.1-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	25,00 %	548.209.000,00	30,00	190.655.000,00
01.1-05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5,00 Paket	222.794.000,00	2,00	110.240.000,00
01.1-05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60,00 Dokumen	7.707.500,00	60,00	7.707.500,00
01.1-05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60,00 Dokumen	7.707.500,00	60,00	7.707.500,00
01.1-05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24,00 Orang	310.000.000,00	10,00	65.000.000,00
01.1-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Kaltim	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95,00 %	4.847.459.800,00	96,00	3.931.001.800,00
01.1-06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	75.000.000,00	0,00	0,00
01.1-06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15,00 Paket	1.606.277.200,00	15,00	1.249.711.800,00
01.1-06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	80.915.000,00	3,00	70.415.000,00
01.1-06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Kaltim dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00 Laporan	2.615.892.600,00	6,00	2.436.875.000,00
01.1-06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5,00 Dokumen	469.375.000,00	6,00	174.000.000,00
01.1-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	1.320.563.200,00	100,00	1.320.563.200,00

RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN 2025	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
01.1-08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00 Laporan	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
01.1-08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00 Laporan	228.392.000,00	12,00	228.392.000,00
01.1-08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13,00 Laporan	1.062.171.200,00	13,00	1.062.171.200,00
01.1-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100,00 %	1.015.384.000,00	100,00	833.310.000,00
01.1-09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00 Unit	84.960.000,00	1,00	84.960.000,00
01.1-09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00 Unit	107.750.000,00	13,00	107.750.000,00
01.1-09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61,00 Unit	42.674.000,00	60,00	40.600.000,00
01.1-09.008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Samarinda	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10,00 Unit	200.000.000,00	10,00	200.000.000,00
01.1-09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00 Unit	580.000.000,00	5,00	400.000.000,00
02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prov. Kaltim	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100,00 %	18.700.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
02.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6,00 Dokumen	18.700.000.000,00	6,00	3.000.000.000,00
02.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa.	10910,00 Orang	16.823.262.500,00	2497,00	2.430.000.000,00

RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN 2025	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan		Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
02.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00 Laporan	1.726.200.000,00	4,00	420.000.000,00
02.1-01.006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat	1,00 Dokumen	150.537.500,00	1,00	150.000.000,00
03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prov. Kaltim	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,30 %	363.467.088.417,00	1,32	3.000.000.000,00
03.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4,00 Dokumen	363.467.088.417,00	5,00	3.000.000.000,00
03.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan	2148,00 Orang	362.811.888.417,00	1900,00	2.580.000.000,00

RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN 2025	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
	serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
03.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00 Laporan	655.200.000,00	4,00	420.000.000,00
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prov. Kaltim	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31,21 %	3.625.648.000,00	33,58	1.500.000.000,00
04.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3,00 Dokumen	3.625.648.000,00	3,00	1.500.000.000,00
04.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1295,00 Orang	3.386.248.000,00	900,00	1.290.000.000,00
04.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00 Laporan	239.400.000,00	4,00	210.000.000,00
05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prov. Kaltim	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100,00 %	2.049.352.000,00	100,00	1.500.000.000,00

RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN 2025	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
05.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4,00 Dokumen	2.049.352.000,00	1,00	1.500.000.000,00
05.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1070,00 Orang	1.847.752.000,00	800,00	1.290.000.000,00
05.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00 Laporan	201.600.000,00	4,00	210.000.000,00
06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prov. Kaltim	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100,00 %	6.700.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
06.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prov. Kaltim	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8,00 Dokumen	6.700.000.000,00	4,00	6.000.000.000,00
06.1-01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang	2015,00 Orang	3.112.000.000,00	1865,00	2.580.000.000,00

RENCANA TAHUN 2024						PERKIRAAN 2025	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU	TARGET CAPAIAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah				
06.1-01.005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Hasil Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	4,00 Laporan	588.000.000,00	4,00	420.000.000,00
06.1-01.006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Prov. Kaltim	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1,00 Dokumen	3.000.000.000,00	1,00	3.000.000.000,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan (2023).

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009